

SBY: Jangan Sampai Upaya 70 Tahun Cegah Perang Dunia dan Nuklir Sia-sia

JAKARTA (IM) - Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta semua pihak mencegah terjadinya akibat yang meluas dari perang Rusia-Ukraina. Ia berharap perang Rusia-Ukraina tak melebar menjadi peperangan antar dunia, bahkan perang nuklir.

"Hingga saat ini, dunia berhasil untuk mencegah terjadinya '2 No Go' tsb ~ Perang Nuklir dan Perang Dunia Ke-3. Jangan sampai upaya besar selama 70 tahun lebih ini sia-sia belaka. Mari cegah kehancuran kehidupan di muka bumi kita," tulis SBY dalam akun Twitter resminya @SBYudhoyono yang dikutip pada, Kamis (3/3).

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mengatakan, hingga kini, dunia berhasil mencegah terjadinya perang dunia ketiga dan perang nuklir. Kendati demikian, pencegahan dinilai tak boleh berhenti, mengingat perang antara Rusia dan Ukraina tengah terjadi.

Ditambah pula, SBY menilai tidak ada yang mengetahui pasti seperti apa ujung dari perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina

tersebut.

"Tidak mudah diprediksi apakah perang segera berakhir atau justru menjadi perang berlarut," ujarnya.

Dia menyadari, perang adalah kelanjutan dari politik dengan cara lain. Akan tetapi, lanjut SBY, setiap perang meski amat dahsyat tetap terbuka peluang untuk diakhiri secara politik pula.

"Semoga terbuka peluang itu," katanya.

Lebih lanjut, SBY meminta semua pihak di dunia jangan pernah terpikirkan untuk berniat menggunakan senjata nuklir dalam peperangan. Oleh karenanya, SBY mengajak semua pemimpin politik di dunia melakukan sesuatu mencegah terjadinya perang dunia ketiga dan perang nuklir.

"Ini sudah 'beyond politics', tetapi sebuah kewajiban moral tertinggi. Pembiaran bukanlah opsi yang bisa diterima," kata SBY.

Tak hanya itu, SBY juga mengajak semua bangsa-bangsa dunia bersuara dan mendukung para pemimpin mereka untuk bersatu mencegah terjadinya perang dunia maupun perang nuklir. ■ han

Pencairan JHT Kembali ke Aturan Lama, Politisi PKS: Jangan Cuma Gimik Politik

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin mengajak semua pihak untuk mengawal pernyataan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah terkait aturan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan kembali ke Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 19 Tahun 2015.

"Terkait JHT kembali ke aturan lama, yang membolehkan pekerja mengambil haknya (JHT) sebelum usia 56 tahun harus dikawal bersama. Jangan cuma menjadi gimik politik," kata Alifudin dalam keterangannya, Kamis (3/3).

Politikus PKS itu menilai, seharusnya proses revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 segera dislesaikan seiring pernyataan Menaker. Revisi itu diharapkan menuntaskan persoalan masyarakat atau kaum pekerja di mana tuntutan pencairan JHT dapat kembali seperti semula, yaitu dicabutnya aturan batasan usia peserta minimal 56 tahun.

"Pada bulan Mei nanti

Permenaker 2 Tahun 2022 ini akan berlaku efektif, jika tidak ada kebijakan tegas dan revisi aturan JHT ini rampung. Jadi mohon sekali lagi kepada pemerintah, jangan korbankan rakyat," tegasnya.

Alifudin mengingatkan bahwa diperlukan pengawasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Pemerintah juga diminta menerima opini masyarakat untuk menentukan apakah kebijakan dapat dilanjutkan atau tidak.

Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah menerangkan bahwa aturan pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan saat ini mengacu pada aturan lama, yakni Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. Pasalnya, beleid baru, yakni Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang rencananya berlaku pada 4 Mei 2022, saat ini masih dalam proses revisi dan belum berlaku efektif.

Sehingga, para pekerja atau buruh yang ingin melakukan klaim JHT dapat menggunakan acuan Permenaker lama, termasuk bagi pekerja yang terkena PHK atau mengundurkan diri. ■ mei

1.117 Napi Beragama Hindu Terima Remisi Khusus Nyepi

JAKARTA (IM) - Sebanyak 1.117 narapidana beragama Hindu menerima remisi khusus dalam rangka Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1944 yang jatuh pada Kamis (3/3).

Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Rika Aprianti mengatakan, remisi khusus bukan sekadar bentuk kehadiran negara dalam memberikan penghargaan dan perhatian bagi narapidana pada hari raya keagamaan.

"Lebih dari itu, pemberian remisi diharapkan memberikan motivasi bagi narapidana untuk menjadi lebih baik dan meningkatkan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa," kata Rika dalam siaran pers, Kamis (3/3).

Dari 1.117 narapidana yang mendapat remisi khusus tersebut, 4 orang menerima remisi khusus II atau langsung bebas, 1 orang bebas setelah mendapat remisi 15 hari, dan 3 lainnya bebas setelah

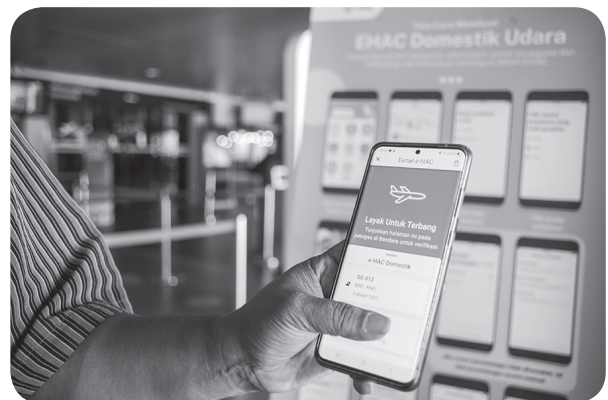
mendapat remisi 1 bulan.

Sementara itu, 1.113 narapidana lainnya mendapatkan remisi khusus I atau pengurangan sebagian, terdiri dari 269 orang menerima remisi 15 hari, 687 orang mendapat remisi 1 bulan, 117 orang menerima remisi 1 bulan 15 hari, dan 40 orang mendapat remisi 2 bulan.

Rika menjelaskan, seluruh proses pemberian remisi dilakukan secara daring melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dan tidak dipungut biaya. "SDP mempermudah kami dalam melakukan pemeriksaan syarat administratif dan substantif yang tentunya telah dipenuhi narapidana penerima remisi," ujar Rika.

Rika menambahkan, hingga 22 Februari 2022, jumlah warga binaan pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia berjumlah 271.252 orang dengan rincian 226.490 narapidana dan 44.762 tahanan. ■ mei

FOTO: ANI

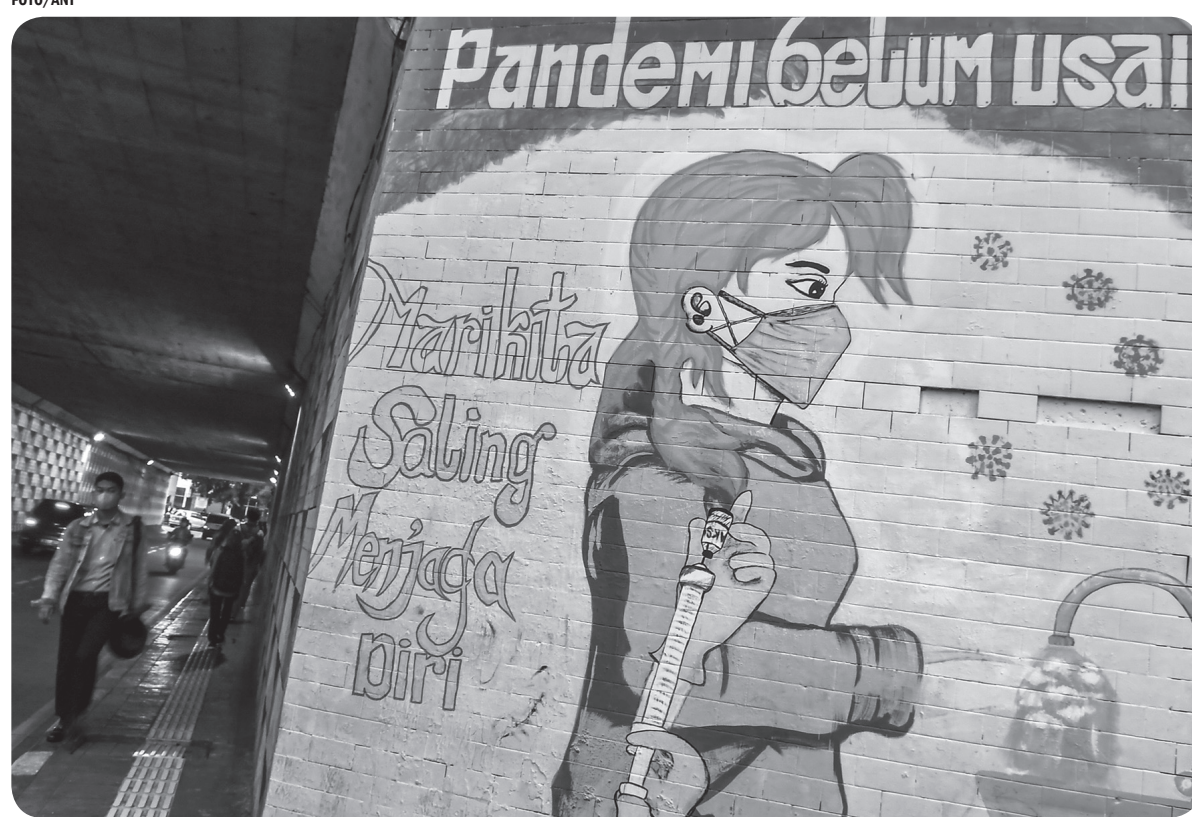


PENGISIAN E HAC SEBELUM KEBERANGKATAN

Calon penumpang menunjukkan electronic Health Alert Card (e-HAC) yang telah diisi di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/3). Untuk menghindari antrean panjang di bandara saat kedatangan, pemerintah membuat kebijakan baru yang mengharuskan pelaku perjalanan domestik untuk mengisi e-Hac sebelum keberangkatan.

2 Polhukam

FOTO: ANI



DUA TAHUN COVID-19 DI INDONESIA

Warga berjalan di dekat mural bertema pencegahan penyebaran COVID-19 di Jakarta, Rabu (2/3). Hingga dua tahun berselang, pada 2 Maret 2022, pemerintah mencatat ada 5.630.096 kasus positif COVID-19 di Indonesia sejak pengumuman kasus pertama, dimana 4.944.237 orang diantaranya telah dinyatakan sembuh sementara 149.0362 orang lainnya meninggal dunia.

Publik Menolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Jokowi

Lebih 74 persen responden menolak adanya perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi atau penundaan Pemilu 2024. Publik menolak semua alasan yang dikemukakan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi.

JAKARTA (IM) - Sejumlah alasan diungkapkan pihak-pihak untuk memuluskan usulan mereka tentang memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi atau menunda pelaksanaan Pemilu 2024.

Salah satu alasan yang dikemukakan adalah kondisi pandemi Covid-19 yang belum berakhir, ekonomi nasional,

hingga keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencoba memotret respon publik terhadap alasan-alasan dari wacana tersebut. Survei ini dimulai dengan mengukur tingkat pengetahuan publik terhadap wacana tersebut.

"Sekitar 48% warga tahu atau pernah dengar tentang usulan perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi hingga 2027, 52 persen tidak tahu," kata Direktur Eksekutif LSI, Dyajadi Hanan dalam paparannya secara daring, Kamis (3/3).

Dyajadi merincikan satu per satu alasan yang digunakan para pengusul dari wacana tersebut. Dimulai dari alasan pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Secara keseluruhan 70,7% publik lebih menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Di kalangan yang tahu isu ini, yang menolak lebih tinggi lagi yaitu 74%. Sementara, di kalangan yang tidak tahu isu ini, penolakannya sedikit lebih rendah tapi tetap mayoritas

yaitu 67,5%

"Apa yang bisa kita lihat di sini, ada dua minimal. Satu, isu perpanjangan masa jabatan presiden itu ditolak oleh mayoritas masyarakat Indonesia menurut survei ini. Yang kedua, kalau isu ini makin disebarkan, makin diketahui oleh publik maka tingkat penolakannya cenderung makin tinggi. Makin diketahui publik isu ini, masyarakat makin menolak," ujarnya.

Dyajadi pun membedah alasan kedua, yakni pemulihan ekonomi. Hasilnya, 68,1% masyarakat secara keseluruhan menolak ide perpanjangan itu, mereka cenderung lebih sepekat dengan sesuai UUD 1945. Di mana, presiden harus dipilih rakyat dan dibatasi hanya dua masa jabatan presiden selama lima tahun dan presiden Jokowi harus mengakhiri masa jabatannya pada 2024 meskipun pandemi blm berakhir.

"Jadi masyarakat lebih menyetujui itu," tuturnya.

Terakhir, yaitu alasan pres-

iden perlu memastikan keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara. Hasilnya, kata dia, sama dengan alasan pertama maupun kedua. Dalam hal ini, masyarakat tetap menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden.

"69,6% masyarakat lebih setuju dengan pendapat kedua atau menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Diantara yang tahu dengan isu ini tingkat penolakan juga lebih tinggi. Maka sekali lagi, sikap dasar masyarakat itu menolak, mayoritas 69,6% Makin tahu makin sadar usulan ini semakin tinggi penolakannya," katanya.

Untuk diketahui, survei LSI ini dilakukan pada periode 25 Februari - 1 Maret 2024 kemarin. Responden yang digunakan sebanyak 1.197 yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, dengan asumsi metode simple random sampling.

Adapun, survei ini juga memiliki toleransi kesalahan (margin of error) ±2,89%, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. ■ han

FOTO: ANI



ANGELINA SONDAKH JALANI CUTI MENJELANG BEBAS MURNI

Mantan anggota DPR Angelina Sondakh duduk di dalam mobil usai keluar dari Lapas Perempuan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur, Kamis (3/3). Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham menyatakan Angelina Sondakh menjalani program cuti menjelang bebas (CMB), dan akan bebas murni pada 27 April 2022 mendatang setelah menjalani masa tahanan selama 10 tahun dalam kasus korupsi proyek Wisma Atlet Palembang.

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INSANI GRAHA MEDIKA

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT INSANI GRAHA MEDIKA (selanjutnya disebut Perseroan), untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 18 Maret 2022
Waktu : RUPST Bagian Pertama : 08.30 – 09.30 WIB
RUPST Bagian Kedua : 09.30 – 10.30 WIB
Tempat : Teraskita Hotel Jakarta, Jl. MT. Haryono Kav. 10A, Cawang, Jakarta 13340
Agenda : RUPST Bagian Pertama

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan masing-masing untuk tahun-tahun buku 2009 - 2020 yang telah di audit Kantor Akuntan Publik dan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas semua tindakan pengurusan yang telah dijalankan oleh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris selama tahun-tahun buku tersebut.

RUPST Bagian Kedua

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen No. 00032/2.0565/AU.2/05/0076-3/1/II/2022 tanggal 7 Februari 2022, dan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas semua tindakan pengurusan yang telah dijalankan oleh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021, termasuk:

- Reklasifikasi keseluruhan tambahan setoran modal per 31 Desember 2021 menjadi laba ditahan; dan
- Pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan dalam bentuk saham (*stock dividend*);

3. Konfirmasi atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan yang memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021;

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan yang akan memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022; dan

5. Penetapan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Catatan:

- Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat memberikan kuasa dengan cara membuat Surat Kuasa untuk menghadiri RUPST yang ditandatangani di atas kertas bermeterai dan harus disampaikan kepada sekretariat Perseroan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari sebelum RUPST.
- Bahan yang akan dibicarakan dalam RUPST tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal diadakan RUPST.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu.

Jakarta, 02 Maret 2022
PT Insani Graha Medika
Direksi

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INSANI MENARA MEDIKA

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT INSANI MENARA MEDIKA (selanjutnya disebut Perseroan), untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"), yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 18 Maret 2022
Waktu : RUPST Bagian Pertama : 14.30 – 15.30 WIB
RUPST Bagian Kedua : 16.00 – 17.00 WIB
Tempat : Savero Hotel Depok, Jl. Margonda Raya No. 230 A, Depok
Agenda : RUPST Bagian Pertama

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan masing-masing untuk tahun-tahun buku 2015 - 2017 dan 2018 - 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan serta pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas semua tindakan pengurusan yang telah dijalankan oleh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 untuk operasional Perseroan tahun buku 2022.

3. Konfirmasi atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan yang memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021;

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan yang akan memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022; dan

5. Penetapan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Catatan:

- Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat memberikan kuasa dengan cara membuat Surat Kuasa untuk menghadiri RUPST yang ditandatangani di atas kertas bermeterai dan harus disampaikan kepada sekretariat Perseroan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari sebelum RUPST.
- Bahan yang akan dibicarakan dalam RUPST tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal diadakan RUPST.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu.

Depok, 02 Maret 2022
PT Insani Menara Medika
Direksi

PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILIHAN SAHAM

PT. WAHANA LOGISTIK SEMESTA berkedudukan di Jakarta Utara ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa pemegang saham Perseroan berencana untuk mengalihkan sebagian besar saham dalam Perseroan kepada pembeli yang ditentukan oleh para pemegang saham, sehingga menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali Perseroan. Bagi pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan pengambilalihan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPST diselenggarakan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (4) dan ayat (8) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), para kreditor Perseroan yang berkeberatan atas rencana pengambilalihan besar saham tersebut dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan pendukung untuk itu ke alamat sebagai berikut:

PT. WAHANA LOGISTIK SEMESTA
Up. Direksi
Jalan Raya Baruna Kade Baru Timur
Pelembihan Sunda Kelapa Cidang 11,
RT 011/RW 008, Ancol, Pademangan,
Jakarta Utara
Jakarta, 4 Maret 2022